



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon 021-27932834, Fax. 021-27932834

Nomor : UM.0102-Sf/297
Lampiran : 9 (sembilan) lembar
Sifat : Segera
Hal : Undangan Training GESI PRIM/PHJD

Jakarta, 31 Mei 2021

Yth.

Daftar terlampir

di tempat

Untuk memperkuat pemerintah daerah dalam implementasi Rencana Aksi GESI (GAP) 10 Lokasi PRIM/PHJD Tahap I, 5 Lokasi PHJD Tahap II, 7 Lokasi PHJD Tahap III, dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pilot PHJD/PRIM Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo, serta mempercepat pemenuhan persyaratan dan kelengkapan bukti proses verifikasi II dan III GAP Pemda dan PPRG, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu unsur Dinas DPU, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, UKPBJ, TP3J, FTKP, FLLAJ, dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang terkait dengan pelaksanaan Training GESI untuk dapat hadir pada acara Training yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d 12.15 WIB Sesi Pagi-Siang,
Pukul 14:00 WIB s.d 16.30 WIB Sesi Siang-Sore
Tempat : Melalui teleconference Zoom di tempat masing-masing
Link Utama (Sesi Pagi-Siang)
ID : 853 5579 6196
Passcode : 302186
Sesi Klinik/Bimbingan Teknis (Siang-Sore) akan disampaikan
Fasilitator kepada masing-masing Peserta.
Agenda : Training GESI-CSE PRIM/PHJD 2021 (Agenda terlampir)

Untuk penyampaian undangan virtual, mohon dikirimkan alamat email dan nomor WA masing-masing peserta kepada Sdr. Agus Waluyo (085856694941).
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala
Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah

Riono Suprpto, ST, SE, MT
NIP 19660126 199703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan)
2. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR
3. Peringgal

Lampiran I

Nomor : UM.0102-SF/297
Tanggal : 31 Mei 2021

Lampiran Daftar Undangan:

A. Kementerian/Lembaga:

1. Tim Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kem. PUPR -- Bp Sudirman Tenaga Ahli PUPR
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri PUPR
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Bappenas
4. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
5. Kepala Sub Direktorat Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga Kem. PUPR
6. Kepala Sub Direktorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga Kem. PUPR
7. Kepala Sub Direktorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kemen PUPR

B. Kedutaan Besar Australia

C. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali
2. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan
3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara
4. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

D. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

1. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bangka Belitung
2. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur
3. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara
4. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat
5. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat

E. Team PMU PHJD/PRIM Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kemen PUPR

1. Bapak Dedy Gunawan, ST, MSc.
2. Bapak Sari Satria Dwipayana, ST, MT
3. Bapak Taufik, ST, MT
4. Bapak Amirudin Yusuf, SE, CA
5. PMU Staff.

F. Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

G. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Dinas Sosial

8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

H. Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Timur

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

I. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

J. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

K. Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo (PRIM)

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

L. Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

M. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

N. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

O. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

P. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Q. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

R. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

S. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

T. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

U. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

V. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

W. Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

X. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Y. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Z. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP

11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

AA. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua PIU PHJD
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Kepala Dinas Perhubungan/Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala UKPBJ
9. Kepala TP3J
10. Kepala FTKP
11. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

BB. KIAT/PIC / VTASC

1. Konsultan Supervisi Terkait
2. Kontraktor Pelaksana Terkait
3. Tim Konsultan Pendamping (APBN)
4. Tim Konsultan Assesment (APBN)

Narasumber/Fasilitator:

1. Bapak Ir. Sudirman, MM
2. Ibu Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS
(Ibu Lisa) –Bappenas
3. Ibu Eni Widiyanti
4. Ibu Siti Aisyah
5. Ibu Elmi Sumarni Ismau
6. Ibu Delvi O Benu, SST
7. Ibu Rossy Rachmawati Kusuma Putri
8. Ibu Umi Setyawati (DPPKB Kab. Probolinggo)
9. Pak Mahargianto
10. Ibu Siti Ruhanawati
11. Ibu Endah Trista Agustina
12. Ibu Ineke Indrarini
13. Ibu Lilla Noerhayati
14. Ibu Asmi Burhan
15. Ibu Jany Agustin
16. Bapak Lalu Sahabuddin

Lampiran II Jadwal Kegiatan

Perihal : GESI Training PHJD/PRIM 2021
Nomor : UM. 01.02 - SF/2021
Tanggal : 31 Mei 2021

**JADWAL TRAINING GESI-CSE
(KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL-
PELIBATAN MASYARAKAT SIPIL) PHJD/PRIM**

Selasa, 8 Juni 2021

Waktu	Tema	Nara sumber
Selasa, 8 Juni 2021		
08:30 — 09:00 WIB	Selamat datang/Pengisian Daftar Hadir, dan Pre-test	PIC-IT/Agus Waluyo
09:00 — 09:20 WIB	Kata Sambutan dan Pembukaan	Bapak Riono Suprpto, SE, ST, M, Kepala Pusat Fasilitas Jalan Daerah Kementerian PUPR.
09:20 – 09:30 WIB	Sambutan Kedutaan Besar	TBC
SESI 1: BERBAGI PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK CERDAS DAN DISKUSI		
09.30 — 10:00 WIB	Pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam PHJD/ PRIM yang lebih inovatif	Bapak Ir. Sudirman, MM, Tim Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kem. PUPR.
	Kata Pengantar dan Paparan Bappenas	Ibu Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS (Ibu Lisa) -Bappenas
	Diskusi	PFID
Panel Diskusi I		
10:00—11:00 WIB	Sosialisasi dan Komunikasi dalam kegiatan PHJD/PRIM dalam meningkatkan keterlibatan peran aktif perempuan dan penyandang disabilitas	Ibu Siti Aisyah - Perwakilan Perempuan dalam FLLAJ dari Muslimat NU, Kabupaten Probolinggo
	Penguatan Kapasitas FLLAJ (Pelibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas/ GARAMIN, Provinsi NTT	Ibu Elmi Sumarni Ismau dari LSM disabilitas NTT GARAMIN
	Peningkatan keterwakilan perempuan dalam konstruksi / pekerjaan fisik	Ibu Rossy Rachmawati Kusuma Putri, seorang pekerja wanita di Belitung, dan Ibu Delvi O Benu, SST- sebagai Teknisi Laboratorium, NTT.
	Penanggung: Ibu Eni Widiyanti	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Panel Diskusi II		
11:00—12:00 WIB	Dukungan peningkatan pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas PPRG PRIM Probolinggo dari sisi Pemda PRIM Probolinggo	Ibu. Umi Setyawati (DPPKB)
	Penyampaian Progres Berdasarkan Pemantauan GESI dan Kelengkapan Data Monev	PIC PHJD - Pak Mahargianto
Diskusi Peserta		Fasilitator
12:00 — 12.15	Rekomendasi dan way forwards	Pak Dedy-PFID. Moderator: Ibu Dinie- Staf PFID PIC & KIAT
12:15 — 14:00	Ishoma/Waktu Istirahat	

SESI 2: KLINIK KERJA TEKNIS 14:00- 16:30

Setiap klinik/bimbingan teknis akan membahas item berikut ini:

- Update Progres implementasi GAP Pemda/PPRG pilot.
- Monitoring Implementasi GAP/PPRG pilot dan penyelesaian pengisian Lembar Monitoring GAP PHJD berdasarkan PMM Lampiran 18, PPRG pilot PHJD/PRIM PRIM Volume II Lampiran 26 dan PMM PHJD Volume II Lampiran 34, dalam persiapan untuk Verifikasi 2 (Juli) dan 3 (November) 2021.
- Tantangan/kendala yang dihadapi dalam implementasi dan monitoring progress serta strategi untuk mengatasinya. .

14.00 — 15.00 WIB	Grup Paralel	Fasilitator
SESI A	Klinik 1 (PHJD Tahap I): - Sultra - Wakatobi	Bu Asmi Burhan (PIC PHJD) Pak Syarif Hartawan (PIC-PK) Pak Fahrin Hersan (PIC-PK)
	Klinik 2 (PHJD Tahap I) - Jabar - NTT	Bu Jany Agustin (PIC PHJD) Pak Johannes Yunerson (PIC-PK) Pak Moch Yunus (PIC-PK)
	Klinik 3 PPRG Tahap I - Jawa Timur - Probolinggo	Bu Ineke (PUG PUPR) / Bu Ana (KIAT) Pak Agus Pornomo (PIC-PK) Pak Rachmad Gunawan (PIC-PK)
	Klinik 4 (PHJD Tahap II) - Sumatera Barat - Pesisir Selatan	Bu Lilla Noerhayati (PUG PUPR) Tim Konsultan Pendamping Tim Konsultan Assessment
	Klinik 5 (PHJD Tahap II) - Sulawesi Selatan - Tana Toraja - Toraja Utara	Pak Lalu Sahabuddin (PIC) Tim Konsultan Pendamping Tim Konsultan Assessment

15:00 — 15:30 WIB	Penutup Klinik Sesi A dan Post test	Fasilitator/PIC-IT
15.00 — 16.00 WIB SESI B	Klinik 1 (PHJD Tahap I) - Malang - Pasuruan	Bu Jany Agustin (PIC) Pak Fadly Basmar (PIC-PK) Pak Agus Purnomo (PIC-PK)
	Klinik 2 (PHJD Tahap I) - Bangka Belitung - Belitung	Bu Asmi Burhan (PIC) Pak Utama (PIC-PK) Pak Yudirwan (PIC-PK)
	Klinik 3 (PHJD Tahap III) - Jawa Tengah - Wonosobo	Bu Lilla Noerhayati (PUG-PUPR) Tim Konsultan Pendamping Tim Konsultan Assessment
	Klinik 4 (PHJD Tahap III) - Humbang Hasundutan - Simalungun - Sumatera Utara	Pak Lalu Sahabuddin (PIC) Tim Konsultan Pendamping Tim Konsultan Assessment
	Klinik 5 (PHJD Tahap III) - Kalimantan Barat - Sambas	Pak Mahargianto (PIC) Tim Konsultan Pendamping Tim Konsultan Assessment
16.00—16.30 WIB	Penutup Klinik Sesi A dan Post test	Fasilitator/PIC-IT

Catatan: PIU mohon menyediakan dokumen pelaksanaan kegiatan GAP Pemda/LGs dan Lembar Monitoring GESI (Lampiran 18 PMM) selama training berlangsung, serta dokumen terkait PPRG untuk Pemda pelaksana pilot PPRG.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

LAPORAN HASIL PELATIHAN GESI

Sidang/rapat : Pelatihan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial PHJD/PRIM
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Waktu : 09.00 WIB – 12.15 WIB (sesi 1)
: 14.00 WIB – 16.30 WIB (sesi 2)
Tema : Pelatihan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial PHJD/PRIM
Tempat : Ruang Rapat Bidang Lalu Lintas Lt. 3, Kantor Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah, Jl. Siliwangi No 355-357, Semarang
Peserta : 1. Erry Derima Ryanto, ATD, MT (Kepala Bidang Lalu Lintas
Pelatihan Jalan);
2. Andi Susmono, ST, M.Si (Kepala Seksi Keselamatan Lalu
Lintas Jalan)
3. Ida Roeni, SE (Staf Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan,
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah)
4. Prila Asih Pratiwi, S.ST (Sekretariat FLLAJ)
5. Ahda Reza Andhika, S.T (Sekretariat FLLAJ)

Hasil Pelatihan :

1. Dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan Melalui Roadmap PUG Kemen PUPR 2020-2024 untuk penyelenggaraan infrastruktur diintegrasikan terhadap perspektif gender, dengan mempertimbangkan kebutuhan, kesulitan, aspirasi perempuan, laki-laki, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Strategi PUG ini sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2000.
2. Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) meliputi:
 - a. Program Management Manual (PMM) PHJD terbaru menyebutkan 4 syarat program aspek lingkungan dan sosial PHJD meliputi: Kesetaraan Gender, Penanganan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Anak dan Pelibatan Masyarakat.
 - b. PHJD memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki serta dalam kelompok disabilitas pada kegiatan pengelolaan jalan (Konsultasi Publik, Pekerjaan Konstruksi, Monitoring dan Evaluasi).
 - c. Mendorong Konsultasi Publik yang dihadiri 30% Perempuan dan melibatkan penyandang disabilitas.

- d. Prinsip aspek sosial dan gender secara lengkap terdapat dalam PMM PRIM/PHJD.
3. Training GESI PHJD/PRIM memberikan dukungan teknis kepada semua daerah untuk menyiapkan dokumen Monitoring dan Evaluasi GAP Pemda dan PPRG (sebagaimana diuraikan dalam PMM PHJD/PRIM). Berbagi tentang strategi efektif dalam pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam PHJD/PRIM 2021 dalam rangka membangun komitmen yang lebih besar di antara pemerintah daerah serta meningkatkan kesadaran di kalangan Pemerintah Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk pengembangan yang lebih luas di daerah baru pada masa mendatang.

KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

ERRY DERIMA RYANTO, ATD, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19690114 199203 1 005

Dokumentasi Kegiatan

